



PEMDA DIY MINTA DEVIASI DIPERKECIL

Lebar, Gap Kinerja Fisik-Keuangan Danais

YOGYA (KR) - Progres pelaksanaan Dana Keistimewaan (Danais) pada kabupaten/kota se-DIY secara umum kinerja keuangannya memiliki gap yang cukup lebar lebih dari 10 persen dibandingkan kinerja fisiknya sampai dengan triwulan III 2019. Untuk itu, Pemda DIY meminta Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Danais 2019 agar segera memperkecil gap deviasi tersebut ke depannya hingga triwulan IV 2019.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Budi Wibowo mengatakan perkembangan pelaksanaan PA Danais 2019 di Kulonprogo dan Gunungkidul dilihat dari kinerja keuangan memiliki gap yang cukup lebar (> 10%) dibandingkan kinerja fisiknya. Kinerja pelaksanaan yang cukup rendah adalah pelaksanaan urusan Tata Ruang di Kulonprogo yang fisiknya mencapai 21,51 persen dan keuangan sebesar 32 persen, sedangkan Gunungkidul fisiknya mencapai 31 persen dan keuangan mencapai 0,49 persen per triwulan III 2019.

"Pelaksanaan kegiatan yang memiliki anggaran besar di Gunungkidul terlambat seperti pembangunan Taman Budaya dan pengadaan lahan Tawang-Ngalang memperlebar kinerja fisik dan keuangan Danais triwulan III 2019. Jadi perlu akselerasi pelaksanaan danais pada Kulonprogo dan Gunungkidul yang sekara ini susah menjadi PA," tutur Budi di Yogyakarta, Senin (28/10).

Budi menjelaskan progres pelaksanaan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Danais 2019 di Kota Yogyakarta, Bantul dan Sleman dilihat kinerja keuangan secara umum juga memiliki gap yang cukup lebar (> 10%) dibandingkan kinerja fisiknya. Kinerja pelaksanaan yang cukup rendah berupa pelaksanaan tata ruang dan yang kinerja keuangannya sangat rendah pada Kota Yogyakarta secara fisik 38,55 persen dan keuangan 32,41 persen, Bantul secara fisik sebesar 21,51 persen dan keuangan 19,93 persen, serta Sleman secara fisik 56,92 persen dan keuangan sebesar 23,05 persen pada triwulan III 2019.

"Guna memperkecil gap pelaksanaan Danais 2019 tersebut masih ada beberapa PR yang harus segera dilakukan. Di antaranya penyelesaian Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan Depok, Parangtritis dan Watugilang yang menjadi penyebab deviasi keuangan pada urusan Tata Ruang Bantul," tandasnya.

Mantan Asekda Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY ini menekankan deviasi keuangan pada urusan Kebudayaan dan Tata Ruang di Gunungkidul karena pembangunan Taman Budaya Gunungkidul masih pada tahap selesai masa sanggah dan pengadaan lahan Tawang-Ngawang masih dalam proses.

Sementara pengelolaan Danais urusan Tata Ruang di Pemkot Yogyakarta disebabkan penataan sirip-sirip Malioboro Jalan Suryatmaja-Pajeksan, penataan pedestrian kawasan Kota Baru, dan penataan saluran air hujan (SAH) di Mondorakan Kotagede yang harus dituntaskan pada tahun ini.

Instansi	Tindak Lanjut
1. Din. Pertanahan	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
2.	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui
3.	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers
4.	
5.	

(ira)-o

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005